



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 10 /B.03/HK/2022
TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU** : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:
- a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan
 - c. Perubahan Peraturan Gubernur.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;
 - b. untuk mengatasi keadaan konflik;
 - c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
 - d. adanya akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.03/HK/2022
 TANGGAL: 2022

**PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 TAHUN 2022**

NO.	INSTANSI PENGUSUL	JUDUL PERGUB	PERTIMBANGAN DAN DASAR PENYUSUNAN
I.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025
		2. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Tindak lanjut Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung
II.	Badan Pendapatan Daerah	1. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022.	Mengatur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan baru tahun 2022 serta NJKB kendaraan tahun-tahun sebelumnya yang digunakan sebagai Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2022.
		2. Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
III.	Badan Kepegawaian Daerah	Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
IV.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	1. Akuisis Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		2. Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		3. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		4. Jadwal Retensi Arsip Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		5. Peningkatan Budaya Literasi	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi
		6. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
V.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah	Tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

VI.	Inspektorat	Pedoman pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
VII.	Rumah Sakit Jiwa Daerah	Pedoman pengadaan, pengelolaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Badan Layanan	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
VIII.	Dinas Lingkungan Hidup	Jakstrada Pengelolaan Sampah	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah
IX.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (lima belas) Ha	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan Percepatan Pelayanan Askes Air Minum Provinsi	Tindak lanjut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
X.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek	1. Pengadaan Barang dan/Jasa BLUD di RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		2. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		3. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah RSUDAM Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) DAN Eksekutif (VVIP) Pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

		6. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Profesional Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
XI.	Biro Organisasi	1. Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut pengajuan perubahan dari Struktur Organisasi Pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
		2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
XII.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penerimaan Peserta Didik Baru	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
		Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
XIII.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rencana Kontijensi Bencana Banjir provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
XIV.	Dinas Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas
XV.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023	Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

		6. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Profesional Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
XI.	Biro Organisasi	1. Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut pengajuan perubahan dari Struktur Organisasi Pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
		2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
XII.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penerimaan Peserta Didik Baru	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
		Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
XIII.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rencana Kontijensi Bencana Banjir provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
XIV.	Dinas Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas
XV.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023	Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:
- a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan
 - c. Perubahan Peraturan Gubernur.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;
 - b. untuk mengatasi keadaan konflik;
 - c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
 - d. adanya akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

		6. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Profesional Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
XI.	Biro Organisasi	1. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
		2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
		3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
XII.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Penerimaan Peserta Didik Baru	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
		2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
		3. Peta Jalan Pengembangan SMK Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	Tindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK
XIII.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rencana Kontijensi Bencana Banjir provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
XIV.	Dinas Sosial	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas
XV.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023	Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:
- a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan
 - c. Perubahan Peraturan Gubernur.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;
 - b. untuk mengatasi keadaan konflik;
 - c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
 - d. adanya akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.